

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan suatu unit terkecil dalam sebuah negara, dimana desa juga sebagai pemasok kebutuhan yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Rendahnya tingkat kualitas hidup yang ada di desa mendorong pemerintah menciptakan berbagai program dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tingkat kemajuan suatu negara pun dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang ada desa, sebab posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Dan desa pun menjadi ujung tombak terhadap identifikasi masalah yang kerap terjadi.

Menurut data BPS terdapat sekitar 83.820 desa yang ada di Indonesia, dan lebih dari 13.232 desa tersebut masuk kedalam kategori desa tertinggal dan jauh dari kata sejahtera<sup>1</sup>.

“Pemerintah pun berupaya untuk mewujudkan program kewirausahaan desa yang di dukung dengan pelatihan sumberdaya manusianya dalam mengelola potensi yang ada. Guna memberikan kemajuan perekonomian masyarakat desa, yang tidak hanya berbasis ekonomi saja, namun juga meliputi aspek sosial, politik, serta peningkatan kualitas layanan<sup>2</sup>”.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang kian sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat terus saja menjadi agenda dalam

---

<sup>1</sup>BPS.go.id. “Jumlah Desa di Indonesia dan Jumlah Desa Tertinggal”. Diakses dari [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1231/sdgs\\_10/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1231/sdgs_10/1) Pada 26 Oktober 2021.

<sup>2</sup>Chindy Sasauw, dkk. 2018. “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 ISSN : 2337 – 5736. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

proses penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa, tentu lah desa menjadi agen pemerintah yang dapat menjangkau berbagai kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan.

Namun, pada realitanya desa justru kian terabaikan di mana selama ini pengembangan ekonomi dan pembangunan selalu dipusatkan di kota. Hal itu pun mendorong terjadinya kesenjangan antara desa dan Kota. Desa juga cenderung tidak diberi keleluasaan dalam mengolah potensi yang dimilikinya, sehingga yang terjadi justru potensi desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi yang ada di perkotaan<sup>3</sup>. Dalam Undang - Undang No 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa peningkatan kreativitas masyarakat desa dapat dilakukan dengan mengelola kekayaan yang dimiliki, dan desa disarankan memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sebab dengan tingginya potensi yang ada di desa, menjadi hal utama dalam memanfaatkan sumber daya tersebut dengan bijak. Yang akan meningkatkan sumber pemasukan atau pendapatan bagi desa.

“Salah satu cara untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan yaitu dengan melalui pertumbuhan lembaga mikro desa, dan salah satu lembaga mikro yang ada di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat Desa, agar mampu membangun desa mandiri yang bisa mengentas permasalahan-permasalahan di desa melalui pemberdayaan masyarakatnya”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 dipaparkan bahwa

---

<sup>3</sup>Nugraha, A., dan Kismartini, 2019. “Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1, hlm. 43. Diakses pada 07 Oktober 2021.

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh desa, dengan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa”.

Pendirian program BUMDes ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pengelolaan ekonomi produktif yang ada di desa, dengan melalui sistem secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable* atau berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program BUMDes juga sangat diperlukan suatu upaya yang konsisten melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan Perangkat Desa untuk mengelola BUMDes agar dapat berjalan baik.

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mana menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri. Dan sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi yang ada di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya<sup>4</sup>”.

Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi desa.

Keleluasaan pengelolaan Bumdes saat ini tentunya sangat mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kreatif untuk memanfaatkan serta mengolah sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kewirausahaan desa dapat

---

<sup>4</sup> as<sup>4</sup> Juliana Lumintang, dkk. (2020). “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu”. *The Studies of Social Science*. Volume 2, Issue 1, 2020 pp. 15-21.

difasilitasi dengan baik oleh masyarakat, disamping pekerjaan mereka sebagai petani dan berkebun. Namun dengan hadirnya BUMDes tidak selalu serta merta dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mudah. Untuk terwujudnya tujuan utama dari pelaksanaan program ini dibutuhkan berbagai dukungan dari pihak-pihak terkait.

“Tetapi tetap saja dalam perjalanan BUMDes ini, tentu akan menemui berbagai kendala terkait pengelolaannya seperti bentuk komunikasi yang kurang efektif, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial anggota, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas dalam penulisan laporan keuangan<sup>5</sup>. Tak hanya itu saja, kegiatan operasional BUMDes juga menghadapi permasalahan umum yang kerap terjadi yaitu dalam hal keterbatasan modal, sistem manajemen yang belum maksimal dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah”.

Sebab kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah, akan berdampak pada tidak optimalnya proses pengelolaan BUMDes tersebut.

Program BUMDes ini pun juga diterapkan di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Bungo Kecamatan Bathin III. Yang bernama Desa Purwo Bakti. BUMDes di desa tersebut dikenal dengan nama BUMDes Subur Makmur Bersama, didirikan pada 23 April 2017. Melalui pengelolaan BUMDes ini, telah sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat. Yang mana desa ini dikenal sebagai penghasil sale pisang, sehingga mendapat julukan sebagai desa Sentra Sale Pisang dan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Bungo.

Permasalahan yang menarik untuk dialami yaitu mengenai kapasitas pengelolaan kelembagaan BUMDes tersebut. Sebab kapasitas pengurus yang belum cukup memadai serta pengetahuan manajerial yang minim bisa menjadi

---

<sup>5</sup>Irfan Nursetiawan, (2018). “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes”. *Jurnal.unigal.ac.id*. Vol 4, No 2. hlm. 78-79. Diakses pada 07 Oktober 2021.

tantangan tersendiri pada pelaksanaan BUMDes. Sehingga BUMDes yang sudah berdiri terkadang tidak bisa berjalan secara maksimal sesuai tujuan utamanya. Jikalau sudah sesuai terhadap potensi yang ada di suatu desa, seringkali terdapat penghalang saat berdirinya BUMDes yaitu tingkat pemasaran yang tidak maksimal dari para pengelola<sup>6</sup>.

“Melalui peran pengurus BUMDes yang memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya harus dimulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan formulasi program, tahapan pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tahap terminasi<sup>7</sup>”.

Dimana dengan adanya proses tahapan-tahapan tersebut masyarakat akan merasa dilibatkan secara penuh, dan akan memahami terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat mengentaskan permasalahan yang bersumber dari mereka sendiri.

Peneliti memperoleh data awal dari hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Subur Makmur Bersama di Desa Purwo Bakti<sup>8</sup>, yang menyebutkan bahwa pada awal pendirian BUMDes yaitu 23 April 2017, telah mendapatkan dana awal sekitar 42 juta rupiah dan belum memiliki pendapatan pertahun, yang mana penggunaan dana awal untuk kegiatan simpan pinjam para pelaku usaha Sale Pisang. Dengan jenis usaha sebagai distributor bahan baku makanan atau kue dan unit usaha papan bunga.

Dimana kendala tersebut yaitu dari aspek keterbatasan sumber daya

---

<sup>6</sup>Nugraha, A., dan Kismantini, op.cit. hlm 44

<sup>7</sup>Fifiyanti, Alyas, Mone, A., 2018. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar”. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, vol. 4, no. 3, hh. 282-296.

<sup>8</sup>Wawancara penulis dengan Direktur Bumdes Subur Makmur Bersama Desa Purwo Bakti Bapak Irja Suhardi Pada Tanggal 11 Oktober 2021.

manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan modal, terbatasnya kegiatan dan program yang belum bersifat berkelanjutan. Serta untuk kesejahteraan anggotanya pun belum bisa dilakukan dengan optimal, sebab masih bersifat sukarela dan belum adanya gaji bagi para anggota. Namun terdapat hal yang menarik dari Bumdes tersebut, yaitu melibatkan para pemudadesa untuk turut terlibat dalam proses kegiatan, seperti pembuatan papan bunga yang dikelola langsung oleh pemuda desa untuk berkreasi dan berinovasi dalam memberikan ide-ide menarik mereka. Serta bekerja sama dengan paguyuban usaha Sale Pisang sebagai suplayer bahan baku.

Peneliti juga mengambil data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di desa Purwo Bakti, terdapat kendala yang perlu dibahas secara lebih dalam mengenai kurangnya keterlibatan perangkat Desa dalam membina para pelaku usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar. Menurut penuturan salah satu narasumber bahwa sulitnya memperoleh bantuan Pemerintah Desa/Rio (sebutan untuk kepala desa di Kabupaten Bungo). Selain itu pula, penyaluran anggaran dari BUMDes yang belum efektif membuat tidak berjalannya tujuan utama dari pelaksanaan BUMDes tersebut dengan maksimal<sup>9</sup>.

“Kemudian pembahasan terkait permasalahan di desa Purwo Bakti ini dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh perangkat desa/Rio, cenderung hanya berfokus pada industri yang sudah berkembang saja. Sehingga hubungan komunikasi antara masyarakat dan perangkat desa tidak berjalan harmonis. Padahal, para pemilik *home industry* ini tentu sangat membutuhkan pembinaan menyeluruh baik dari perangkat desa maupun pengelola BUMDes itu sendiri, agar industrinya bisa berkembang pesat sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa bisa

---

<sup>9</sup>Joko Sunaryo. dkk (2019). “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Home Industry Sale Pisang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dusun Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)”. Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 Juni 2019. Diakses pada tanggal 17 September 2021.

meningkat<sup>10</sup>”.

Masalah lainnya yaitu masih minimnya pemahaman pengurus BUMDes terkait BUMDes itu sendiri, serta bentuk dari kapasitas manajerial yang tidak memadai.

“Meskipun BUMDes dirancang sebagai ujung tombak dari perekonomian desa, akan tetapi banyak BUMDes yang mati sebelum dapat berkembang karena minimnya partisipasi dari warga. BUMDes pun juga perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa yang pernah terjadi sebelumnya<sup>11</sup>”.

Berdasarkan dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan BUMDes, penulis memperoleh data di wilayah provinsi Maluku, dalam mengatasi permasalahan pengelolaan BUMDes sebagai salah satu solusi yang efektif. Yaitu dimana pemerintah daerah tersebut telah melakukan pelatihan bagi para anggota pengurus BUMDes dengan bekerja sama antara Kemendes melalui Balai Latihan Masyarakat (BLM Ambon). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dilakukan di tingkat kecamatan dengan menghadirkan pengurus BUMDes dari berbagai desa. Agar dapat mencapai hasil maksimal, BLM Ambon juga melibatkan LSM yaitu Yayasan Hahessi serta akademisi dalam program pelatihan tersebut<sup>12</sup>.

Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat memang bukan hal yang mudah, namun usaha keras dari masyarakat saja untuk memenuhi perekonomian mereka, tanpa adanya dukungan dari

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Poniati selaku pemilik *home industry* sale pisang merk sumber rezeki, pada tanggal 5 April 2019. (Sunaryo, Joko dkk. 2019)

<sup>11</sup>Faedlulloh, D., 2018. “BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris”. *Journal of Governance*, vol. 3, no. 1, hh. 1-17.

<sup>12</sup>Elsina Huberta Appono, dkk.(2020). “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”.*Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)* Vol 03.No. 02 Desember 2020.

perangkat desa atau Rio, pemerintah daerah, dan program aktif dari BUMDes itu sendiri akan menjadi sulit untuk tercapai. Sehingga terciptanya kemandirian masyarakat terjadi karena adanya suatu bentuk kerja sama antar seluruh aspek yang ada, guna memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Oleh sebab itu, melalui bentuk kemandirian ekonomi bisa dikembangkan dan dikelola dengan membangun BUMDes yang harus mengimplementasikan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*. Yang mana, ruang lingkupnya dijadikan tujuan besar ke depan bagi program pengabdian terhadap masyarakat. Hal ini pun termasuk dalam bidang pendidikan dan pelatihan, serta yang paling utama yaitu pembentukan jiwa dan karakter kewirausahaan masyarakat itu sendiri<sup>13</sup>”.

Peneliti pun mengambil data penelitian terkait BUMDes yang telah berhasil dengan cara mengembangkan kemampuan wirausaha dari pengurus BUMDes, guna memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar senantiasa terus maju dan berkembang, dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan asli desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan BUMDes Panyanggar telah berjalan baik, berkat adanya sinergi antar Kepala Desa, BPD dan pengurus BUMDes.<sup>14</sup>

Disamping tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan Oleh Joko Sunaryo dkk, Shanti Veronica Br Siahaan, dan terakhir Elsina Huberta Appona dkk. Penulis melakukan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan,

---

<sup>13</sup>Supriyadi Thalib. dkk (2020). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Melalui Penguatan Bumdes. Jurnal Abdimas Vol.1 (2) (Februari 2020) hal: 95-104.

<sup>14</sup>Shanti Veronica BrSiahaan. dkk (2020). “Sinergi Kades, BPD dan Pengurus Bumdes dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Melalui Kegiatan Bumdes”. Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VII Nomor 2 2020.

bahwa penulis lebih berfokus terhadap kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mendukung pengembangan unit UKM yang ada, dan juga terkait faktor yang mempengaruhi dalam penguatan kapasitas BUMDes Subur Makmur Bersama di Desa Purwo Bakti. Sedangkan penelitian Joko Sunaryo lebih berfokus kepada peranan Rio/Kepala Desa terhadap meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan *home industry* di desa Purwo Bakti. Serta belum adanya bantuan dari Rio/Pemerintah Desa terhadap pemilik *home industri* melalui anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dan untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Shanti Veronica Br Siahaan dkk, dengan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian tersebut lebih berfokus kepada faktor yang menjadi pembentuk sinergi Kepala Desa, BPD dan Pengurus BUMDes dalam upaya mewujudkan pendapatan desa melalui kegiatan BUMDes di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang dimana BUMDes Panyanggar mengalami kevakuman pada periode pertama kepengurusan dan menghadapi berbagai kendala. Selain itu, untuk penelitian yang dilakukan oleh Elsina Huberta Appona dkk di Propinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat yang berbicara tentang permasalahan BUMDes, yaitu kapasitas pengurus yang belum cukup memadai serta pengetahuan manajerial yang minim.

Berdasarkan penjabaran permasalahan sebelumnya dan didukung dengan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu. Peneliti menyadari bahwa masih banyaknya permasalahan dalam kapasitas pengelolaan kelembagaan BUMDes di

desa Purwo Bakti. Padahal BUMDes menjadi suatu wadah penting bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat desa dengan mengelola potensi sumber daya. Hal demikian ini justru dapat menghambat tujuan pelaksanaan BUMDes yang telah memiliki kewenangan besar dalam mengelola potensi desa dengan berlandaskan hukum dan peraturan yang disahkan pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya bentuk kajian lebih lanjut terkait kapasitas kelembagaan BUMDes, guna mewujudkan BUMDes yang efektif dan efisien. Untuk itu, peneliti pun tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Kapasitas Kelembagaan dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam meningkatkan kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?
- 1.2.2 Apa upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam

meningkatkan kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

- 1.3.2 Untuk menganalisis upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta menambah pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya terkait kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- 1.4.2 Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pentingnya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

#### **1.5 Landasan Teori**

Dalam setiap penelitian teori merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi landasan berfikir dalam setiap proses yang akan dilakukan oleh peneliti. Landasan teori pun merupakan suatu konsep yang memiliki variable

serta pernyataan dengan penyusunan secara sistematis. Teori pun dapat dipahami sebagai seperangkat konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan antara satu sama lain, yang dimana menunjukkan fenomena serta dapat meramalkan bentuk suatu fenomena yang dibangun atas jalinan fakta-fakta<sup>15</sup>. Sehingga melalui teori peneliti dapat memahami suatu fenomena atau permasalahan sosial dengan baik. Pada penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa teori yang relevan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

### **1.5.1 Konsep Kapasitas Kelembagaan**

Pengembangan kapasitas merupakan suatu bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari baik secara lingkup formal maupun informal. Pengembangan kapasitas kelembagaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan juga pengembangan sistem manajerial. Kemudian dapat dipahami bahwa kapasitas adalah hal yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas ini dapat pula diartikan pula sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan dalam sistemnya.

Peningkatan kapasitas juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau pun masyarakat untuk menganalisa lingkungannya;

---

<sup>15</sup>Ismail Nurdin, dkk. 2019. *Metodologi Penelitian sosial*. Surabaya : Media sahabat Cendikia. Hlm 6.

mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang yang ada, serta memformulasi strategi-strategi tersebut untuk mengatasi masalah-masalah, dan dapat memanfaatkan peluang yang relevan dengan sebaik mungkin.

“Secara umum konsep *capacity building* ini dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* juga diartikan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta dengan penguasaan kompetensi-kompetensi yang ada<sup>16</sup>”.

Sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi kendala dalam perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga dengan maksimal.

### 1.5.2 Teori Pengembangan Kapasitas

Di dalam Buku *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance* yang ditulis oleh Riyadi Soepranto MS, menjelaskan bahwa penekanan *capacity building*<sup>17</sup> yaitu ;

1. Melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk training, rekrutmen dan pemutusan pegawai secara profesional, manajerial dan teknis yang berlaku. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola suatu unit sesuai dengan tupoksi masing-masing.

---

<sup>16</sup> Jenivia Dwi Ratnasari. dkk.(2013). “Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang”.Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h. 103-110.

<sup>17</sup>Teras ksbsi.com.“Konsep Umum Pengembangan Kapasitas”. Diakses dari <https://teraskbsi.com/2020/12/16/konsep-umum-pengembangan-kapasitas/> Pada tanggal 18 Oktober 2021.

2. Bentuk keorganisasian, yaitu memaparkan pengaturan struktur organisasi, proses, sumber daya dan gaya dalam penerapan manajemen dengan baik, guna menjalankan tugas sebaik mungkin .
3. Jaringan kerja (*network*), yaitu berupa koordinasi, aktifitas organisasi, dan juga fungsi networking itu sendiri, serta interaksi formal dan informal yang berlangsung. Jaringan kerja ini pun memberikan dampak besar bagi perkembangan kapasitas suatu organisasi, untuk saling bekerja sama dengan organisasi yang lainnya.
4. Lingkungan organisasi, yaitu adanya aturan (*rule*) berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, serta dukungan keuangan dan anggaran.
5. Ruang lingkup kegiatan yaitu harus memiliki batasan khusus yang lebih luas, dan meliputi banya faktor-faktor, baik itu politik, ekonomi, sosial dan berbagai faktor lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas kinerja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbagai macam upaya pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, baik itu mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja yang ada di dalamnya. Yang mana melalui konsep pengembangan kapasitas kelembagaan ini tentu memiliki suatu tujuan secara umum agar individu, organisasi maupun sistem yang ada dapat

dipergunakan secara efektif dan efisien, untuk terwujudnya pencapaian tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan terkait konteks pembangunan pada saat ini, yaitu untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna membangun lembaga-lembaga yang dapat berjalan secara optimal dalam semua aspek yang ada, dan juga mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini.

### 1.5.3 Konsep Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai atau kemampuan kerja yang merupakan prestasi yang diperlihatkan oleh seseorang/kelompok orang dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kinerja pun merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, baik itu kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi. Kemudian dapat dipahami terkait kinerja pada level organisasi merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi dan manajemen organisasi<sup>18</sup>”.

Terdapat beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

#### a. Indikator kinerja

Dalam hal kinerja pengelola BUMDes dapat ditentukan dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri atas indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan juga akuntabilitas.

#### 1) Produktivitas

Merupakan konsep dari produktivitas yang tidak hanya mengukur pada tingkat

---

<sup>18</sup>Jurnal stieww.ac.id.Dimas Satrio Wibowo, (2019). Analisis Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa Catur Mandiri Desa Caturharjo. Diakses dari <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/download/347/236> Pada Tanggal 12 Desember 2021.

efisiensi dan efektivitas pelayanan saja. Namun juga terkait rasio antara input dengan output organisasi tersebut.

## 2) Kualitas layanan

Pada dasarnya organisasi publik tentulah memiliki fungsi sebagai aktor yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri. Maka dari itu kualitas pelayanan yang diberikan itu baik, sehingga kinerja organisasinya juga bisa dikatakan baik pula.

## 3) Responsivitas

Responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan tersendiri, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari lingkup masyarakat tersebut.

## 4) Responsibilitas

Dijelaskan bahwa responsibilitas merupakan hal yang terkait pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang telah dilakukan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau kebijakan yang benar dalam lingkungan organisasi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.

## 5) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai rujukan terkait seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang telah dipilih oleh rakyat, dengan adanya asumsi pejabat publik tersebut yang merepresentasikan kepentingan rakyatnya.

Secara sederhana kinerja dapat dimaknai sebagai bentuk prestasi kerja yang

mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. Dengan demikian kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan sebuah hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi. Sehingga peran kinerja ini sangatlah menentukan terwujudnya tujuan pemerintah itu sendiri. Sebab dengan melalui penentuan tujuan dari setiap unit organisasi bisa menjadi strategi dalam meningkatkan kinerja. Dan memberi arah serta dapat mempengaruhi bagaimana seharusnya melakukan suatu perilaku kerja yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong<sup>19</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Faktor individu (*personal factors*). Yaitu faktor individu yang mana berkaitan dengan bentuk keahlian, motivasi, komitmen, dan lainnya, yang dimiliki masing-masing individu berdasarkan kompetensinya.
- b. Faktor kepemimpinan (*leadership factors*). Yaitu faktor kepemimpinan yang berkaitan dengan tingkat kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja kepada para pegawainya.
- c. Faktor kelompok/rekan kerja (*team factors*). Yaitu berupa faktor kelompok/rekan kerja yang berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja sendiri kepada sesama mereka.
- d. Faktor sistem (*system factors*). Yaitu faktor terkait sistem yang berkaitan

---

<sup>19</sup>Armstrong, M. and Baron, A. 1998. *Performance Management – The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.

dengan sistem/metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi masing-masing.

- e. Faktor situasi (*contextual/situational factors*). Yaitu faktor yang berkaitan dengan situasi dimana terdapat tekanan dan perubahan dalam lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal di sebuah organisasi.

#### **1.5.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengertian terkait BUMDes salah satunya terdapat pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, yang ditegaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

“Pendirian BUMDes ini pun memiliki fungsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu bentuk sumber kegiatan ekonomi yang ada di desa tersebut.”

Sebagai lembaga ekonomi modal usaha BUMDes atas dasar inisiatif masyarakat yang mengelola secara mandiri dan pemenuhan atas modal bersumber dari masyarakat itu sendiri. Atau pun mengajukan pinjaman modal terhadap pihak luar.

Dalam Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>20</sup>Ade Eka Kurniawan. (2015).“Jurnal Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)”. Jurnal.umrah.ac.id. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2021.

dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Guna mengembangkan beragam potensi perekonomian yang ada di wilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara signifikan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang mana dalam upaya mengurangi atau mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan melalui bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi produktif serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi berwirausaha.
- c. Meningkatkan tingkat peranan masyarakat desa dalam hal mengelola bantuan modal usaha yang berasal dari Pemerintah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau pun sumber lainnya yang sah.

Di dalam Buku *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif* yang disusun oleh Kementerian Desa, substantif kelembagaan BUMDes merupakan hal yang sangat penting.

“Melalui struktur organisasi yang menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa yang utama, dengan mengatur mengenai susunan nama pengurus BUMDes yang dipilih langsung dalam Musyawarah Desa. Dimana susunan kepengurusan organisasi pengelola Bumdes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Dan penamaan susunan kepengurusan dapat disesuaikan dengan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan<sup>21</sup>”.

Program BUMDes tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, melalui kehadirannya BUMDes diharapkan mampu membantu mengatasi beberapa isu-isu strategis di kawasan pedesaan yakni terkait potensi ekonomi lokal desa yang dimana pengelolaannya belum optimal

---

<sup>21</sup>Anom Surya Putra.(2015).*Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia..

akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa tersebut<sup>22</sup>.

Kemudian untuk pengelolaan BUMDes harus berlandaskan 6 (enam) prinsip utamanya yaitu<sup>23</sup> :

- 1) Kooperatif, yang mana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan bentuk kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya menjadi lebih baik.
- 2) Partisipatif, Yaitu melibatkan semua komponen di dalam BUMDes dan harus bersedia secara sukarela untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes tersebut.
- 3) Emansipatif, Semua komponen anggota yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, ras, dan agama.
- 4) Transparan, Segala macam aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Sehingga setiap kegiatan bisa dipercaya oleh masyarakat.
- 5) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif oleh anggota BUMDes.
- 6) Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan berkelanjutan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara optimal dan sesuai dengan tujuan BUMDesitu sendiri.

Disini pun, BUMDes menjadi salah satu lembaga ekonomi yang

---

<sup>22</sup>Kumolo T. (2017). *Integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.

<sup>23</sup>Romadhon,(2020). "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo".:UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

dikhususkan di lingkungan perdesaan, seperti halnya BUMDes yang ada di Desa Purwo Bakti. Program BUMDes jangan hanya dijadikan sebagai formalitas saja tanpa diterapkan dengan baik. Kehadiran BUMDes pun harus memiliki tujuan pengelolaan kinerja, agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pula, supaya tidak berkembangnya suatu sistem usaha yang bersifat kapitalis di Pedesaan dan dapat mengganggu nilai-nilai atau norma-norma kehidupan asli masyarakat desa.

BUMDes pun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah. Program tersebut berupa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dengan berkoordinasi melalui pemerintah daerah dan membutuhkan partisipasi masyarakat secara konsisten dan terpadu. Yang mana melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membentuk konsep perencanaan dan pengelolaan pembangunan perekonomian desa secara terstruktur.

## 1.6 Kerangka Pikir



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui serangkaian proses yang sesuai dengan kaidah ilmiah yaitu rasional, empiris dan sistematis sesuai ketentuan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang/masyarakat yang ada di dalam masalah sosial tertentu<sup>24</sup>.

“Selain pendapat tersebut, Neuman mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realita sosial dan pemahaman mengenai budaya. Selain itu, pendekatan kualitatif juga lebih berfokus kepada proses yang bersifat dinamis yang dapat dilihat dari peristiwa yang telah diamati karena adanya keterlibatan peneliti secara langsung dalam proses penelitian kualitatif tersebut<sup>25</sup>”.

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini berguna untuk menggambarkan suatu kondisi nyata dan apa adanya yang di dapat dari hasil penelitian secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, Metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono, adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas<sup>26</sup>. Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah karena peneliti

---

<sup>24</sup>Creswell, J.W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed: Achmad Fawaid, penerjemah* (3th ed). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>25</sup>Neuman, W.L. (2013). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*: Edina T. Sofia, Penerjemah (7th ed). Jakarta: PT Indeks.

<sup>26</sup>Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 3.

dalam hal ini ingin menggambarkan fenomena-fenomena yang peneliti peroleh dari berbagai sumber data dan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Sekitar 15 menit dari pusat kota Bungo. BUMDes Subur Makmur Bersama di Desa Purwo Bakti telah berdiri sekitar 4 Tahun dan menjadi dikenal sebagai Desa Sentra Sale Pisang dan Oleh-Oleh khas Kabupaten Bungo.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus peneliti agar dapat lebih memahami penelitian yang dilakukan dan mencapai tujuan penelitian yang telah disusun, maka penelitian ini akan berfokus berfokus pada bagaimana bentuk kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan kinerja BUMDes di desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Guna memperoleh tingkat kinerja kelembagaan BUMDes Subur Makmur Bersama yang sudah sejauh mana bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **1.7.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu melalui data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sehingga data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan<sup>27</sup>.
2. Data sekunder dapat diartikan secara umum sebagai data yang

---

<sup>27</sup>Nasution, (2007).*Metode Research*, (Cet. IX; Jakarta, Bumi Aksara), h.143.

diperoleh dengan memanfaatkan literatur seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, media online, foto-foto, rekaman audio atau pun benda-benda lainnya yang mendukung proses penelitian.

“Data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Yang mana data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentic*, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya<sup>28</sup>”.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Peneliti akan mewawancarai calon informan sesuai penelitian yang diambil yaitu terkait Analisis Kapasitas Kelembagaan dalam Meningkatkan Kinerja Bumdes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan yaitu *purposive sampling*. Yang mana teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan berdasarkan tujuan atau maksud dari penelitian tersebut<sup>29</sup>.

Dalam hal ini, peneliti pun memilih informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan guna memperoleh data yang akurat. Serta peneliti akan melakukan wawancara dengan calon informan yang telah ditentukan yaitu :

1. Direktur BUMDes Subur Makmur Bersama Desa Purwo Bakti.
2. Kepala Desa Purwo Bakti (Datin Purwo Bakti).
3. Unit Usaha Sale Pisang Sumber Rezeki.

---

<sup>28</sup>Sayuti Una, (2014)*Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi : Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Cet. Kedua). hal. 34.

<sup>29</sup>Sugiono, op. cit. hlm68

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
5. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan BUMDes Subur Makmur Bersama di Desa Purwo Bakti.

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dimaknai sebagai suatu metode yang melibatkan seluruh indra yang ada untuk memperoleh data.

“Observasi pun merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian kualitatif. Dengan melalui proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini pula, pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dibahas<sup>30</sup>”.

Dan berkenaan dengan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian tersebut. Baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan<sup>31</sup>. Selain itu, wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh

---

<sup>30</sup>Beni Ahmad Saebani. *“Metode Penelitian”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008). hal. 186.

<sup>31</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung, Tarsito, 2003), h. 162.

informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menunjang serta memperoleh data-data tambahan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Melalui teknik dokumentasi data-data yang peroleh dapat dipelajari, mencatat poin-poin atau data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan. Dokumentasi tersebut pun dapat berupa tulisan maupun gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terkait Kapasitas Kelembagaan dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

#### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan di implementasikan. Sedangkan menurut Moleong<sup>32</sup>, analisis data merupakan suatu proses dalam mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan oleh peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana<sup>33</sup> dan terdiri dari kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sehingga hal

---

<sup>32</sup>Salim dan Syahrudin, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media), hlm. 145.

<sup>33</sup>Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.

tersebut dapat dimaknai sebagai berikut, yaitu<sup>34</sup> :

### **1. Kondensasi Data**

Kondensasi data merupakan suatu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan yang ada di lapangan, transkrip wawancara atau pun dokumen dan materi *empiric* lainnya. Kondensasi data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap dan menjadi lebih padat. Sehingga letak dari perbedaan antara reduksi dan kondensasi terletak dari cara penyederhanaan data. Dan kondensasi lebih kepada menyesuaikan seluruh data yang diperoleh tanpa harus memilah atau mengurangi data tersebut. Kondensasi data pun lebih mengakomodir data secara menyeluruh tanpa mengurangi temuan yang ada di lapangan selama proses penelitian tersebut berlangsung.

### **2. Sajian Data**

Sajian data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan gambaran tentang data keseluruhan yang diperoleh, dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Peneliti pun berusaha menyusun keseluruhan data tersebut kedalam penyajian data yang lebih detail serta mudah untuk dipahami. Seperti menyajikan data yang telah di kondensasikan dalam bentuk konseptual, matriks, grafik dan lain sebagainya.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses

---

<sup>34</sup>Sandu Siyoto dkk. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publising. Hlm 100.

analisis data suatu penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian juga harus berdasarkan data yang diperoleh dan ditemukan dari berbagai sumber, dianalisis, dan kemudian di kondensasikan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam proses penelitian yang telah dilakukan.

#### **1.7.8 Keabsahan atau Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan atau kebenaran suatu data dengan memanfaatkan metode yang lain. Yang mana di luar data tersebut, diperlukan untuk proses pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data yang diperoleh. Keabsahan atau triangulasi menurut William Wiersman, yaitu berkaitan dengan pengujian kredibilitas data, dan triangulasi berarti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu<sup>35</sup>.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi ini dimanfaatkan sebagai bahan pengecekan keabsahan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara. Penelitian pun dilakukan dengan informan kunci yang lainnya, kemudian peneliti akan mengkonfirmasi dengan bentuk studi dokumentasi yang berhubungan dalam proses penelitian dan hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga adanya jaminan dari keabsahan data tersebut.

---

<sup>35</sup>William Wiersma, (1986). *Research Methods In Education: An Introduction*, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.

Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi kombinasi yang merupakan bentuk penggunaan data melalui berbagai sumber data yang diperoleh dalam proses penelitian yang dilakukan, tenaga peneliti, teori-teori relevan serta teknik metodologis dalam suatu penelitian atau melalui gejala sosial yang terjadi.